

HUDAN LIN-NAAS

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Volume: 7, no 1, Juni 2026

ISSN: 2775-1198 (p), (2775-2755 (e)

<http://ejournal.unia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/index>

Peran Pemerintah Desa Curahrejo Dalam Mendorong Inovasi Pelayanan Berbasis Dana Desa Di Era Otonomi Daerah

Muhammad Arif Maulana Hakim¹, Aminullah²

^{1,2}Universitas Yudharta Pasuruan

arifmaulana748@gmail.com, aminullah@yudharta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Curahrejo dalam mendorong inovasi pelayanan publik berbasis Dana Desa melalui pelaksanaan program Kios e-Pak Ladi di Desa Curahrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang telah berjalan di tingkat desa, tetapi belum diketahui secara mendalam sejauh mana Pemerintah Desa berperan dalam menginisiasi, mendukung, dan mengembangkan inovasi tersebut secara substantif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis dan studi kasus. Fokus analisis menggunakan tiga dimensi peran pemerintah desa, yaitu regulator, fasilitator, dan akselerator. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, operator Kios e-Pak Ladi, tokoh masyarakat, dan warga pengguna layanan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal Pemerintah Desa Curahrejo telah menjalankan peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator melalui penyediaan dasar administratif, dukungan anggaran, penerbitan surat keputusan operator, serta penyediaan sarana pendukung pelayanan. Namun, secara substantif, peran tersebut masih cenderung bersifat administratif dan reaktif. Substansi kebijakan, skema layanan Kios e-Pak Ladi, sistem aplikasi, serta peningkatan kapasitas operator lebih banyak berasal dari Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan. Keterbatasan anggaran dan kendala infrastruktur digital juga memengaruhi kemampuan desa dalam mengembangkan inovasi secara mandiri. Dengan demikian, Pemerintah Desa Curahrejo lebih tepat diposisikan sebagai follower atau pengikut dalam difusi inovasi pelayanan publik, bukan sebagai pioneer atau pelopor.

Kata kunci: Pemerintah, Inovasi, Dana Desa, Otonomi Daerah.

Abstract

This study aims to analyze the role of the Curahrejo Village Government in fostering public service innovation funded by the Village Fund through the implementation of the *Kios e-Pak Ladi* program in Curahrejo Village, Sukorejo District, Pasuruan Regency. The study was motivated by the existence of a population administration service innovation at the village level, yet the extent to which the Village Government substantively initiated, supported, and developed this innovation remained unclear. A qualitative approach was employed, utilizing descriptive-analytical methods and a case study design. The analysis focused on three dimensions of the village government's role: regulator, facilitator, and accelerator. Data were gathered through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. Informants included the Village Head, Village Secretary, *Kios e-Pak Ladi* operator, community leaders, and service users. Data analysis followed the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldana, comprising data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing/verification. Data validity was ensured through source triangulation, technique triangulation, and member checking. The results indicate that, formally, the Curahrejo Village Government has fulfilled its roles as regulator, facilitator, and accelerator by providing an administrative foundation, budgetary support, operator appointment decrees, and service infrastructure. However, substantively, these roles remain largely administrative and reactive in nature. The policy substance, *Kios e-Pak Ladi* service scheme, application system, and operator capacity building originated primarily from the Pasuruan Regency Population and Civil Registration Agency (Dispendukcapil). Budgetary limitations and digital infrastructure constraints also hindered the village's ability to develop the innovation independently. Consequently, the Curahrejo Village Government is more accurately characterized as a follower rather than a pioneer in the diffusion of this public service innovation.

Keywords: *Government, Innovation, Village Fund, Regional Autonomy.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, responsif, transparan, dan akuntabel merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Priono et al., 2025) Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pelayanan publik menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pemerintah karena merupakan bentuk nyata kehadiran negara yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan adaptif terhadap teknologi, pemerintah dituntut untuk terus melakukan inovasi. Dengan demikian, inovasi pelayanan publik tidak lagi sekadar pilihan, tetapi menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada tingkat lokal, pemerintahan desa memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa berhadapan langsung dengan berbagai kebutuhan warga, seperti pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kebutuhan dasar lainnya. (Hapsari & Sudaryanti, 2020) Oleh karena itu, pemerintah desa tidak cukup hanya menjalankan pelayanan administratif secara rutin, tetapi juga dituntut mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Inovasi pelayanan di tingkat desa diharapkan mampu memperpendek prosedur, meningkatkan aksesibilitas, menghemat waktu dan biaya, serta memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Kewajiban pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan publik memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan bahwa salah satu tujuan pengaturan desa adalah meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum. (Hudi et al., 2025) Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan penyelenggara pelayanan publik menetapkan dan menerapkan standar pelayanan. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa memberikan pedoman bagi desa dalam mendekatkan dan mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat. Selanjutnya, Permen PANRB Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menciptakan, mengembangkan, dan melembagakan inovasi secara berkelanjutan. (Zai et al., 2025)

Peluang pemerintah desa untuk melakukan inovasi semakin besar dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal melalui Dana Desa. (Astuti1 et al., 2025) Dana Desa memberikan sumber daya keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, serta peningkatan

pelayanan publik. Oleh karena itu, Dana Desa seharusnya tidak hanya dipandang sebagai sumber pembiayaan pembangunan fisik, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menciptakan inovasi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pemanfaatan Dana Desa dalam mendukung inovasi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pengelolaan sumber daya, serta pengembangan program secara berkelanjutan. Kondisi tersebut relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Pasuruan, termasuk Desa Curahrejo Kecamatan Sukorejo. Dukungan fiskal dan pembinaan dari pemerintah kabupaten pada dasarnya telah memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, ketersediaan anggaran dan regulasi belum secara otomatis menghasilkan inovasi yang lahir dari inisiatif pemerintah desa. Faktor kapasitas sumber daya manusia, kemampuan perencanaan, kepemimpinan, pemanfaatan teknologi, serta keberanian aparatur dalam mengembangkan program baru turut menentukan keberhasilan inovasi pelayanan.

Salah satu inovasi pelayanan yang terdapat di Desa Curahrejo adalah Kios e-Pak Ladi (Elektronik Pelayanan Administrasi Kependudukan Langsung Jadi). Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran tanpa harus datang secara langsung ke kantor kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Keberadaan layanan tersebut menunjukkan adanya upaya mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa. Namun, berdasarkan temuan awal, e-Pak Ladi bukan merupakan inovasi yang sepenuhnya diinisiasi oleh Pemerintah Desa Curahrejo. Program tersebut merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan kemudian diterapkan di berbagai desa. Artinya, Pemerintah Desa Curahrejo lebih berperan sebagai pelaksana atau penerima program daripada sebagai aktor utama yang menginisiasi inovasi melalui perencanaan dan pemanfaatan Dana Desa. Kondisi serupa

juga terlihat dalam upaya digitalisasi website desa yang dilakukan melalui pendampingan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata pada tahun 2025.

Inisiatif tersebut menunjukkan adanya perkembangan digitalisasi, tetapi dukungan utamanya masih berasal dari pihak eksternal dan belum sepenuhnya diarahkan pada pengembangan pelayanan administratif inti desa. (Nugroho, 2025) Fenomena tersebut menunjukkan adanya kecenderungan ketergantungan Desa Curahrejo terhadap program inovasi yang berasal dari pemerintah kabupaten maupun pihak luar. Padahal, melalui kewenangan dan Dana Desa yang dimiliki, pemerintah desa memiliki peluang untuk mengembangkan inovasi berdasarkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat setempat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Pemerintah Desa Curahrejo telah menjalankan perannya dalam menginisiasi, mendukung, dan mengembangkan inovasi pelayanan publik secara mandiri. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kondisi tersebut adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa. Pengembangan inovasi membutuhkan kemampuan teknis, administratif, perencanaan, pengelolaan anggaran, serta pemanfaatan teknologi. Dalam praktiknya, perangkat desa dapat menghadapi kesulitan dalam menerjemahkan kebutuhan inovasi ke dalam program yang dapat dibiayai melalui Dana Desa. Selain itu, kekhawatiran terhadap risiko administratif dapat menyebabkan pemerintah desa lebih memilih kegiatan pembangunan fisik yang dianggap lebih mudah direncanakan dan dipertanggungjawabkan. (Okpriyanto et al., 2026)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan anggaran belum tentu menghasilkan inovasi apabila tidak didukung kapasitas aparatur dan kepemimpinan yang memadai. Fenomena tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan desentralisasi fiskal dengan realitas implementasinya. Desa telah diberikan kewenangan dan dukungan sumber daya yang relatif besar untuk mengelola urusan pemerintahan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Namun, apabila inovasi pelayanan masih bergantung pada program eksternal, maka tujuan desentralisasi untuk meningkatkan kemandirian desa belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, penting

untuk mengkaji peran Pemerintah Desa Curahrejo dalam mengoptimalkan kewenangan dan Dana Desa sebagai sumber daya untuk mendorong inovasi pelayanan publik. Dalam perspektif administrasi publik, fenomena tersebut dapat dianalisis melalui teori peran Biddle dan Thomas. Teori ini menjelaskan bahwa setiap aktor dalam sistem sosial memiliki harapan, tanggung jawab, dan perilaku yang melekat pada kedudukannya. Dalam konteks pemerintahan desa, Pemerintah Desa Curahrejo memiliki peran strategis sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator. Sebagai regulator, pemerintah desa berperan menetapkan arah kebijakan dan mengalokasikan Dana

Desa untuk mendukung inovasi. Sebagai fasilitator, pemerintah desa menyediakan sarana, prasarana, anggaran, dan dukungan yang diperlukan agar inovasi dapat berjalan. Sementara sebagai akselerator, pemerintah desa berperan mendorong, mempercepat, mengembangkan, dan menjaga keberlanjutan inovasi pelayanan. Berdasarkan temuan awal, ketiga peran tersebut belum sepenuhnya terlihat secara optimal di Desa Curahrejo karena inovasi pelayanan yang ada masih banyak dipengaruhi oleh inisiatif pemerintah kabupaten maupun pihak eksternal. Kondisi ini menjadi kesenjangan yang menarik untuk dikaji, khususnya mengenai bagaimana pemerintah desa menggunakan kewenangan dan Dana Desa untuk menghasilkan inovasi yang berasal dari kebutuhan masyarakat dan dapat dikembangkan secara mandiri. Penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya berfokus pada keberadaan atau pelaksanaan inovasi pelayanan publik, tetapi secara khusus menganalisis peran pemerintah desa sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator dalam mendorong inovasi berbasis Dana Desa. Penelitian ini menempatkan Dana Desa bukan sekadar sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi sebagai sumber daya strategis yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kapasitas, kepemimpinan, dan inisiatif pemerintah desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis dan strategi studi kasus. (Syaban & Mokodompit, 2024) Pendekatan

kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam peran Pemerintah Desa Curahrejo dalam mendorong inovasi pelayanan berbasis Dana Desa. Penelitian tidak hanya mendeskripsikan keberadaan inovasi pelayanan, tetapi juga menganalisis proses, perilaku, interaksi, serta strategi pemerintah desa dalam menjalankan perannya sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena berdasarkan pengalaman dan perspektif aktor yang terlibat secara langsung. Menurut Creswell, penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial.(Wulandari et al., 2025) Oleh karena itu, data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data. Jenis penelitian deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris di Desa Curahrejo sekaligus menganalisisnya menggunakan Teori Peran Biddle dan Thomas. Teori tersebut digunakan untuk melihat tiga dimensi utama, yaitu peran pemerintah desa sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator.

Strategi penelitian menggunakan studi kasus dengan lokasi penelitian di Desa Curahrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena Desa Curahrejo memiliki inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui Kios e-Pak Ladi yang telah berjalan, tetapi program tersebut pada dasarnya berasal dari inisiatif pemerintah kabupaten. Kondisi tersebut menjadi relevan untuk menganalisis sejauh mana pemerintah desa berperan aktif dalam menopang, mengembangkan, dan mengoptimalkan inovasi melalui kewenangan serta Dana Desa. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu Mei sampai Juli 2026. Fokus penelitian diarahkan pada tiga peran Pemerintah Desa Curahrejo. Pertama, regulator, meliputi kebijakan desa, penganggaran melalui APBDes, serta penyusunan standar dan prosedur pelayanan. Kedua, fasilitator, meliputi penyediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi, pelatihan, dan pendampingan masyarakat. Ketiga, akselerator,

meliputi inisiatif pemerintah desa, koordinasi lintas pihak, percepatan pelaksanaan, serta keberlanjutan inovasi pelayanan berbasis Dana Desa pada periode 2023–2025.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa Jamil, Sekretaris Desa Abdul Rohim, S.Pd.I., perangkat desa pengelola inovasi Ainun Naim, tokoh masyarakat M. Zainudin Hafid, serta masyarakat pengguna layanan, yaitu M. Yunus, Halimah, dan Halimatussya'diah. Informan dipilih secara purposive dan dapat berkembang secara snowball sesuai kebutuhan penelitian. Data sekunder diperoleh dari APBDes, RKPDDes, Peraturan Desa, laporan realisasi Dana Desa 2023–2025, serta dokumen resmi terkait Kios e-Pak Ladi dan pembinaan pemerintahan desa. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data kemudian dianalisis berdasarkan tiga dimensi peran pemerintah desa sehingga menghasilkan temuan yang bersifat deskriptif sekaligus analitis. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member checking*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari kepala desa, perangkat desa, pengelola layanan, tokoh masyarakat, dan pengguna layanan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi desa. (Pramiyati et al., 2017) Sementara itu, *member checking* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi kepada informan kunci. Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan temuan yang kredibel dan mampu menjelaskan secara mendalam bagaimana Pemerintah Desa Curahrejo menjalankan perannya dalam mendorong inovasi pelayanan berbasis Dana Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya terbatas pada pelaksanaan fungsi administratif, tetapi juga mencakup kemampuan pemerintah

dalam menciptakan kebijakan, menyediakan sumber daya, serta mendorong perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, pemerintah desa memiliki kedudukan strategis karena menjadi institusi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Kedekatan tersebut menuntut pemerintah desa untuk mampu memahami kebutuhan masyarakat dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan serta program pelayanan yang efektif, mudah diakses, dan berkelanjutan.(R, 2018) Dalam penelitian ini, peran Pemerintah Desa Curahrejo dianalisis menggunakan perspektif teori peran Biddle dan Thomas (1966). Peran dipahami sebagai seperangkat perilaku, tanggung jawab, dan harapan yang melekat pada kedudukan seseorang atau suatu organisasi dalam sistem sosial. Dengan demikian, kedudukan Pemerintah Desa Curahrejo sebagai penyelenggara pemerintahan membawa konsekuensi adanya tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik sekaligus mengembangkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peran tersebut tidak hanya dilihat dari keberadaan program inovasi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah desa terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengembangan, dan keberlanjutan inovasi pelayanan.(Alfianzi, 2022). Secara analitis, peran Pemerintah Desa Curahrejo dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu regulator, fasilitator, dan akselerator. Sebagai regulator, pemerintah desa berperan dalam menetapkan arah kebijakan dan menciptakan dasar administratif yang memungkinkan inovasi pelayanan dapat dilaksanakan. Peran ini dapat dilihat melalui penyusunan kebijakan desa, pengintegrasian program inovasi ke dalam perencanaan pembangunan desa, penyusunan APBDes, serta pengalokasian Dana Desa untuk mendukung peningkatan pelayanan publik. Peran regulator menjadi penting karena inovasi yang tidak didukung kebijakan dan penganggaran yang jelas akan sulit berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, yaitu menyediakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan dan mengembangkan inovasi pelayanan.

Fasilitasi dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana, dukungan teknologi,

sumber daya manusia, peningkatan kapasitas perangkat desa, serta pendampingan masyarakat dalam memanfaatkan layanan. Dalam konteks Desa Curahrejo, peran ini penting untuk melihat sejauh mana pemerintah desa memberikan dukungan terhadap keberlangsungan layanan seperti Kios e-Pak Ladi, termasuk apakah terdapat dukungan anggaran, operator, fasilitas pelayanan, sosialisasi, dan upaya pengembangan layanan.(Lubis & Artamevia, 2025). Sementara itu, sebagai akselerator, pemerintah desa memiliki peran untuk mendorong dan mempercepat proses inovasi agar tidak berhenti pada tahap pelaksanaan program yang sudah tersedia. Pemerintah desa diharapkan mampu mengambil inisiatif, membangun koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pihak lain, mengidentifikasi hambatan, serta mencari solusi untuk memperluas manfaat inovasi. Peran akselerator juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa untuk memastikan inovasi dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak sepenuhnya bergantung pada program yang berasal dari pihak eksternal. Ketiga peran tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Peran sebagai regulator memberikan dasar kebijakan dan kepastian penganggaran, peran sebagai fasilitator menyediakan sumber daya yang diperlukan, sedangkan peran sebagai akselerator memastikan inovasi dapat berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas. Oleh karena itu, keberhasilan Pemerintah Desa Curahrejo dalam mendorong inovasi pelayanan publik tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya inovasi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah desa mampu menjalankan ketiga peran tersebut secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan.

Dengan menggunakan tiga dimensi tersebut, penelitian ini berupaya melihat kesenjangan antara peran ideal Pemerintah Desa Curahrejo dengan praktik yang terjadi di lapangan. Analisis tersebut penting untuk mengetahui apakah pemerintah desa telah menjadi aktor utama dalam mendorong inovasi pelayanan berbasis Dana Desa atau masih lebih banyak berperan sebagai penerima dan pelaksana program yang berasal dari pemerintah kabupaten maupun pihak eksternal. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kapasitas dan kontribusi Pemerintah

Desa Curahrejo dalam mewujudkan pelayanan publik yang inovatif, mandiri, responsif, dan berkelanjutan.

Inovasi Pelayanan Berbasis Dana

Inovasi pelayanan berbasis Dana Desa merupakan upaya pemerintah desa untuk menciptakan, mengembangkan, atau menyempurnakan sistem pelayanan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia melalui Dana Desa. Inovasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan dalam prosedur, mekanisme, pola kerja, maupun pendekatan pelayanan agar menjadi lebih efektif, efisien, mudah diakses, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, inovasi pelayanan berbasis Dana Desa dapat dipahami sebagai bentuk pemanfaatan kewenangan dan sumber daya keuangan desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Dalam konteks pemerintahan desa, keberadaan Dana Desa memberikan peluang yang cukup besar bagi pemerintah desa untuk mengembangkan pelayanan sesuai dengan karakteristik dan permasalahan masyarakat setempat. (Aprilia Hapsari et al., 2021)

Dana Desa tidak semestinya hanya dipandang sebagai sumber pembiayaan pembangunan fisik, tetapi juga dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan sistem pelayanan yang lebih inovatif. Pemanfaatan tersebut harus tetap disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan prioritas masyarakat desa. Inovasi pelayanan berbasis Dana Desa pada dasarnya berangkat dari adanya permasalahan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian melalui pendekatan baru. Pemerintah desa perlu mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelayanan, seperti prosedur yang panjang, keterbatasan akses masyarakat, kurangnya informasi, keterbatasan sarana, maupun rendahnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah desa dapat merumuskan inovasi yang memberikan kemudahan dan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena

itu, keberhasilan inovasi tidak hanya diukur dari keberadaan program baru, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menyelesaikan persoalan pelayanan dan memberikan perubahan positif bagi masyarakat. (Pehi & Rompas, 2023)

Salah satu bentuk inovasi pelayanan yang relevan dengan penelitian ini adalah pelayanan administrasi kependudukan melalui Kios e-Pak Ladi di Desa Curahrejo. Keberadaan layanan tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan administrasi kependudukan dengan lebih dekat tanpa harus selalu datang langsung ke instansi pada tingkat kabupaten. Meskipun demikian, karena e-Pak Ladi merupakan program yang berasal dari pemerintah kabupaten, penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan program tersebut, tetapi lebih jauh menganalisis sejauh mana Pemerintah Desa Curahrejo memberikan dukungan dan memanfaatkan Dana Desa untuk mempertahankan, mengembangkan, atau memperluas manfaat layanan tersebut.

Dalam penelitian ini, inovasi pelayanan berbasis Dana Desa dapat dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengembangan, dan keberlanjutan. Pada aspek perencanaan, perhatian diarahkan pada sejauh mana kebutuhan inovasi pelayanan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan desa seperti RKPDes. Pada aspek penganggaran, analisis difokuskan pada kebijakan APBDes dan penggunaan Dana Desa untuk mendukung inovasi. Pada aspek pelaksanaan, penelitian melihat bagaimana inovasi dijalankan dan siapa saja pihak yang terlibat. Selanjutnya, aspek pengembangan berkaitan dengan upaya pemerintah desa meningkatkan kualitas maupun cakupan layanan. Adapun aspek keberlanjutan berkaitan dengan kemampuan desa mempertahankan inovasi agar tidak berhenti ketika dukungan dari pihak eksternal berakhir. Dengan demikian, inovasi pelayanan berbasis Dana Desa tidak dapat dipahami hanya sebagai pengadaan teknologi atau penciptaan aplikasi baru.

Esensi inovasi terletak pada kemampuan pemerintah desa dalam menggunakan kewenangan, anggaran, sumber daya manusia, teknologi, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk menghasilkan pelayanan yang lebih baik. Dalam konteks Desa Curahrejo, hal yang menjadi perhatian utama adalah apakah Dana Desa telah

dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung inovasi pelayanan atau masih terdapat ketergantungan terhadap program yang berasal dari pemerintah kabupaten dan pihak eksternal. Oleh karena itu, inovasi pelayanan berbasis Dana Desa dalam penelitian ini ditempatkan sebagai suatu proses yang menuntut inisiatif, kreativitas, kapasitas, dan komitmen pemerintah desa. Semakin besar keterlibatan pemerintah desa dalam merencanakan, membiayai, melaksanakan, mengembangkan, dan mempertahankan inovasi, semakin kuat pula indikasi bahwa desa telah mampu memanfaatkan Dana Desa sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, apabila inovasi masih sepenuhnya bergantung pada program dan pembiayaan pihak eksternal, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan peran dan kapasitas pemerintah desa dalam menciptakan inovasi pelayanan yang mandiri dan berkelanjutan.

Peran Pemerintah Desa Curahrejo Dalam Mendorong Inovasi Pelayanan Berbasis Dana Desa Di Era Otonomi Daerah

Desa Curahrejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Sejak tahun 2020, Desa Curahrejo menjadi salah satu dari dua puluh desa yang ditunjuk sebagai lokasi uji coba Kios e-Pak Ladi atau Elektronik Pelayanan Administrasi Kependudukan Langsung Jadi. Kehadiran program tersebut menjadikan kantor Desa Curahrejo tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan desa, tetapi juga sebagai tempat pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. (Sari et al., 2024) Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor kecamatan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Dari sisi keuangan, berdasarkan dokumen Realisasi APBDes Tahun 2025, pendapatan Desa Curahrejo dianggarkan sebesar Rp1.609.444.039 dengan realisasi sebesar Rp1.547.274.339. Sementara itu, belanja desa dianggarkan sebesar Rp1.471.496.000 dan terealisasi sekitar Rp1.398.311.770. Sebagian besar belanja desa diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Kondisi tersebut menjadi konteks penting untuk melihat bagaimana Dana Desa dimanfaatkan dalam mendukung

pelayanan publik, khususnya pelayanan yang berbasis teknologi dan inovasi.

Sebagai pemerintahan yang berada paling dekat dengan masyarakat, Pemerintah Desa Curahrejo memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa, kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun, dan perangkat desa lainnya. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah desa telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui Kios e-Pak Ladi dan media digital lainnya untuk menyampaikan informasi pemerintahan kepada masyarakat. Kios e-Pak Ladi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Keberadaan layanan tersebut menunjukkan adanya perubahan mekanisme pelayanan dari yang sebelumnya terpusat di tingkat kecamatan atau kabupaten menjadi lebih dekat dengan masyarakat melalui kantor desa. Meskipun demikian, program Kios e-Pak Ladi pada dasarnya merupakan program yang dirancang oleh Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, keberadaan program tersebut menjadi penting untuk dianalisis guna mengetahui sejauh mana Pemerintah Desa Curahrejo berperan sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator dalam pelaksanaan inovasi pelayanan publik. (Rahman, 2023)

Kondisi masyarakat Desa Curahrejo yang memiliki mata pencaharian beragam, seperti pertanian, perdagangan, usaha mikro, dan jasa, menyebabkan kebutuhan terhadap pelayanan administrasi yang mudah dan cepat semakin penting. Pemerintah desa dituntut untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam mendukung pelayanan tersebut, pemerintah desa telah memiliki berbagai sarana dan prasarana berupa kantor desa, ruang pelayanan, komputer, printer, jaringan internet, serta fasilitas Kios e-Pak Ladi. Ketersediaan sarana tersebut menunjukkan adanya dukungan terhadap digitalisasi pelayanan, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, dan dukungan infrastruktur. Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara

mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, operator Kios e-Pak Ladi, tokoh masyarakat, dan warga pengguna layanan. Data wawancara kemudian diperkuat melalui observasi dan studi dokumentasi terhadap APBDes serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Seluruh data tersebut dianalisis berdasarkan tiga dimensi peran pemerintah, yaitu regulator, fasilitator, dan akselerator. (Suharmanto & Supardal, 2025)

Dalam menjalankan peran sebagai regulator, Pemerintah Desa Curahrejo secara administratif telah memiliki kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, prioritas kebijakan dan penggunaan anggaran desa masih lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program pembangunan jalan usaha tani, penanganan sampah, serta pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes menjadi beberapa program yang lebih mendapatkan perhatian dalam penggunaan anggaran desa. Terkait dengan Kios e-Pak Ladi, Kepala Desa menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Curahrejo pada dasarnya menjalankan program yang telah dirancang oleh Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan. Skema pelayanan dan aplikasi yang digunakan bukan merupakan hasil pengembangan internal pemerintah desa, melainkan sistem yang telah disiapkan oleh pemerintah kabupaten. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi pemerintah desa lebih banyak sebagai pelaksana kebijakan daripada sebagai pihak yang merancang inovasi pelayanan. (Rohmah et al., 2025)

Pola yang sama terlihat pada rencana pengembangan pelayanan di masa mendatang. Rencana penerapan Tanda Tangan Elektronik dalam pelayanan surat-menyerurat desa juga masih mengikuti arahan dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sumber inisiatif pengembangan pelayanan berbasis teknologi masih dominan berasal dari pemerintah daerah. Dengan demikian, peran regulator Pemerintah Desa Curahrejo telah berjalan pada tingkat formal, tetapi belum menunjukkan tingkat inisiatif substantif yang kuat. Pada dimensi fasilitator, Pemerintah Desa Curahrejo memberikan dukungan melalui penyediaan tempat

pelayanan, komputer, printer, jaringan internet, serta anggaran untuk pelayanan administrasi kependudukan. Berdasarkan APBDes, terdapat alokasi pada pos Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan sebesar Rp2.000.000 pada tahun 2025 dan Rp1.000.000 pada tahun 2026. Data tersebut membuktikan bahwa pemerintah desa tidak sepenuhnya mengabaikan kebutuhan anggaran untuk pelayanan administrasi kependudukan.

Namun, jumlah anggaran tersebut relatif kecil dan mengalami penurunan sebesar 50 persen pada tahun 2026. Pada tahun 2025, anggaran sebesar Rp2.000.000 tersebut dapat direalisasikan seluruhnya. Sementara itu, honor operator Kios e-Pak Ladi tidak dialokasikan sebagai insentif khusus, melainkan telah menjadi bagian dari tunjangan atau siltap perangkat desa. Dengan demikian, dukungan pemerintah desa terhadap inovasi pelayanan secara finansial masih berada pada tingkat minimal. Meskipun demikian, operator Kios e-Pak Ladi menilai bahwa dukungan Pemerintah Desa Curahrejo sudah cukup, terutama dalam penyediaan tempat, komputer, dan kebutuhan operasional pelayanan. Perbedaan antara besarnya anggaran dan persepsi operator menunjukkan adanya kesenjangan persepsi mengenai kecukupan dukungan. Bagi pelaksana, dukungan tersebut dianggap memadai karena kebutuhan operasional pelayanan relatif sederhana. Namun, apabila dilihat dalam perspektif pengembangan inovasi secara berkelanjutan, keterbatasan anggaran dapat menjadi faktor yang membatasi kemampuan desa untuk melakukan pengembangan lebih lanjut.

Pada dimensi akselerator, Pemerintah Desa Curahrejo telah menunjukkan peran administratif melalui penunjukan operator Kios e-Pak Ladi sejak tahun 2020. Penunjukan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk memastikan keberlangsungan pelayanan. Akan tetapi, dalam aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia, operator memperoleh pelatihan atau Bimbingan Teknis dari Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan, bukan dari pemerintah desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi akselerasi belum sepenuhnya berasal dari internal pemerintah desa. Pemerintah desa menyediakan struktur dan pelaksana, sedangkan

peningkatan kapasitas teknis lebih banyak dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Selain itu, dalam pelaksanaan pelayanan ditemukan kendala berupa jaringan internet yang terkadang lambat atau mengalami gangguan. Kendala tersebut perlu dipahami sebagai faktor eksternal karena berkaitan dengan jaringan dan sistem yang berada di luar kendali langsung pemerintah desa. Dari perspektif masyarakat, Kios e-Pak Ladi memberikan manfaat yang cukup nyata. Warga pengguna layanan menyatakan bahwa pengurusan dokumen kependudukan menjadi lebih mudah dan cepat karena mereka tidak perlu datang langsung ke kecamatan atau kabupaten. (Oktavia et al., 2025)

Akan tetapi, masyarakat umumnya tidak mengetahui secara jelas asal-usul program maupun pihak yang menggagas inovasi tersebut. Mereka lebih berorientasi pada hasil pelayanan yang diterima daripada proses dan aktor yang berada di balik penyelenggaraannya. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, ditemukan pola yang konsisten berupa perbedaan antara peran formal-administratif dan peran substantif-inisiatif Pemerintah Desa Curahrejo. Secara formal, pemerintah desa telah menjalankan ketiga dimensi peran. Peran regulator ditunjukkan melalui keberadaan kebijakan desa, peran fasilitator melalui penyediaan anggaran dan fasilitas, sedangkan peran akselerator terlihat melalui penunjukan operator dan dukungan terhadap keberlangsungan pelayanan. Namun, ketika dianalisis lebih mendalam, terlihat bahwa sebagian besar sumber inisiatif berasal dari pemerintah kabupaten. Pemerintah Desa Curahrejo lebih banyak menyesuaikan diri dengan program yang telah dirancang oleh Dispendukcapil daripada menciptakan inovasi berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi sendiri di tingkat desa. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kelengkapan administratif dan kapasitas substantif pemerintah desa dalam mendorong inovasi pelayanan. (Pratama et al., 2025)

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Peran Biddle dan Thomas yang menempatkan aktor sosial berdasarkan kedudukan dan ekspektasi yang melekat pada posisi tersebut. Pemerintah desa tidak hanya diharapkan menjalankan kewajiban administratif, tetapi juga mampu menggunakan kewenangannya untuk mengambil inisiatif

dan memberikan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Curahrejo, peran tersebut lebih banyak dijalankan secara reaktif daripada proaktif. Jika dikaitkan dengan konsep difusi inovasi, Pemerintah Desa Curahrejo lebih tepat diposisikan sebagai follower daripada pioneer. Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan berperan sebagai pihak yang merancang dan mengembangkan Kios e-Pak Ladi, sedangkan Pemerintah Desa Curahrejo mengadopsi dan melaksanakan program tersebut. Pola ini menunjukkan karakter inovasi yang bersifat top-down, sehingga ruang pemerintah desa untuk menjadi pelopor inovasi menjadi lebih terbatas. Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Prasetyo dan Muis yang menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa cenderung lebih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur dibandingkan inovasi pelayanan non-infrastruktur. Kondisi serupa terlihat di Curahrejo, ketika pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan pelayanan administrasi kependudukan memperoleh alokasi yang relatif kecil.

Temuan ini berbeda dengan penelitian Susanto dan rekan-rekan yang menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa merupakan faktor penting dalam mendorong inovasi pelayanan. Di Curahrejo, kepala desa belum terlihat sebagai motor utama pengembangan inovasi pelayanan administratif, tetapi lebih berperan sebagai pelaksana kebijakan yang berasal dari pemerintah kabupaten. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pembangunan kapasitas SDM dan partisipasi masyarakat belum berjalan secara simultan. Kapasitas operator lebih banyak dibangun oleh pemerintah kabupaten, sedangkan masyarakat cenderung menjadi penerima manfaat yang pasif. Beberapa faktor menjelaskan kondisi tersebut. Faktor pertama adalah desain Kios e-Pak Ladi yang bersifat top-down sehingga ruang inisiatif pemerintah desa relatif terbatas. Faktor kedua adalah keterbatasan anggaran, karena pelayanan administrasi kependudukan belum menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa. Faktor ketiga adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia internal dalam bidang teknologi informasi. Faktor keempat adalah persoalan jaringan internet yang berada di luar kendali langsung desa. Faktor kelima adalah rendahnya keterlibatan masyarakat

dalam proses pengembangan inovasi karena masyarakat lebih berorientasi pada hasil pelayanan yang mereka terima. (Arifin et al., 2025)

Penurunan anggaran pelayanan administrasi kependudukan dari Rp2.000.000 pada tahun 2025 menjadi Rp1.000.000 pada tahun 2026 juga memperlihatkan bahwa ruang fiskal untuk mendukung inovasi pelayanan masih terbatas. Kondisi tersebut semakin penting untuk diperhatikan karena pelayanan administrasi kependudukan berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, meskipun nilai anggarannya relatif kecil, keberadaannya tetap memiliki arti penting terhadap keberlanjutan pelayanan publik di tingkat desa. Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa analisis mengenai peran pemerintah desa perlu memperhatikan bukan hanya keberadaan dokumen administratif, tetapi juga sumber inisiatif di balik pelaksanaan peran tersebut. Pemerintah desa yang memiliki Perdes, anggaran, dan operator belum tentu memiliki kapasitas inovasi yang sama dengan desa yang secara aktif merancang dan mengembangkan inovasinya sendiri. Oleh karena itu, perbedaan antara peran administratif-formal dan substantif-inisiatif dapat memperkaya penggunaan teori peran dalam penelitian administrasi publik.

Secara praktis, Pemerintah Desa Curahrejo memiliki peluang untuk meningkatkan perannya melalui pengembangan inovasi yang berasal dari kebutuhan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan sosialisasi mengenai pelayanan digital. Pemerintah desa juga dapat mengembangkan inovasi sederhana yang tidak sepenuhnya bergantung pada program pemerintah kabupaten. Sementara itu, Dispendukcapil dan DPMD Kabupaten Pasuruan perlu mengembangkan pola pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada implementasi program, tetapi juga mendorong desa untuk memiliki kapasitas dan inisiatif sendiri. Kebaruan penelitian ini terletak pada perbedaan antara peran formal-administratif dan peran substantif-inisiatif dalam melihat posisi pemerintah desa sebagai aktor inovasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi, anggaran, dan perangkat pelaksana tidak secara otomatis menunjukkan bahwa pemerintah desa merupakan penggerak utama inovasi. Selain itu,

penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana perubahan kebijakan Dana Desa pada tahun 2026 dapat berpengaruh terhadap alokasi anggaran pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Desa Curahrejo sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator dalam mendorong inovasi pelayanan publik berbasis Dana Desa melalui program Kios e-Pak Ladi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga peran tersebut telah dilaksanakan secara formal-administratif, tetapi belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk peran substantif dan inisiatif mandiri desa. Sebagai regulator, Pemerintah Desa Curahrejo telah memiliki Peraturan Desa sebagai dasar penyelenggaraan Kios e-Pak Ladi. Namun, substansi kebijakan, sistem, dan aplikasi berasal dari Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian, peran regulator desa cenderung reaktif karena lebih banyak menyesuaikan kebijakan kabupaten daripada menghasilkan inovasi berdasarkan kebutuhan masyarakat secara mandiri. Sebagai fasilitator, pemerintah desa menyediakan tempat, perangkat pelayanan, serta anggaran untuk administrasi kependudukan. Namun, alokasi anggaran mengalami penurunan dari Rp2.000.000 pada 2025 menjadi Rp1.000.000 pada 2026. Honor operator juga tidak diberikan sebagai insentif khusus, melainkan menjadi bagian dari tunjangan perangkat desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan fasilitasi telah tersedia, tetapi belum menjadi prioritas utama. Sebagai akselerator, pemerintah desa telah menunjuk operator sejak 2020. Akan tetapi, pelatihan dan peningkatan kapasitas lebih banyak diberikan oleh Dispendukcapil, sedangkan kendala jaringan internet juga berada di luar kendali desa. Meskipun masyarakat merasa pelayanan lebih cepat dan mudah, hal tersebut belum menunjukkan bahwa desa merupakan penggerak utama inovasi. Secara keseluruhan, Pemerintah Desa Curahrejo lebih tepat diposisikan sebagai follower daripada pioneer dalam inovasi pelayanan publik. Desa berperan dalam menjalankan dan mendukung program, sementara sumber utama inovasi berasal dari pemerintah kabupaten.

Daftar Pustaka

- Alfianzi, D. (2022). Pengaruh Pembangunan Industri Pertahanan Terhadap Pertahanan Negara. *Jurnal Teknik Industri, Sistem Informasi ...*, 6(3), 6209–6216. http://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_tinsika/article/view/91%0Ahttp://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_tinsika/article/download/91/67.
- Aprilia Hapsari, Muhammad Guntur, & Rukmana, N. S. (2021). Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Public Service Innovation in Kecamatan Mallawa Maros Regency. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 283–304. <https://makassar.lan.go.id/jap/index.php/jap/article/download/77/59>.
- Arifin, M. Z., Ramadhan, M. S., Saputra, R., & Nurila, I. (2025). Politik Hukum Dana Desa dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan. *Jolasos : Journal Of Law And Social Society*, 9–30. <http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkhiang/issue/view/1/Halaman>.
- Astuti1, S. J. W., Putra, B. T., & Dianto, A. K. (2025). Dari Kepatuhan Anggaran Menuju Inovasi Kebijakan: Tantangan Implementasi Alokasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Kusuma Iv*, 3(November), 204–217. <https://journalng.uwks.ac.id/kusuma/article/view/790/476>.
- Hapsari, R. A., & Sudaryanti. (2020). Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Optimalisqasi Pelayanan Administrasi Kependudukan(Studi di Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung). *Administrasi Publik*, 11(2), 112–128. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/8385/6705>.
- Hudi, M., Sholikin, A., & Ramadhan, O. G. (2025). KONSTITUTIONALISME PEMBUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG DESA “Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(2). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/8385/6705>.
- Lubis, M., & Artamevia, M. (2025). Mewujudkan Desa Mandiri: Peran Regulasi Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Lokal. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(3), 481–492. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/619/373>.
- Nugroho, W. A. (2025). Pendampingan Digitalisasi Administrasi Desa Berbasis Aplikasi dan Sistem Informasi Online. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 01(1), 22–28. <https://publikasi.nexusjurnal.com/index.php/jpkm>.

- Okpriyanto, D., Leniwati, D., & Malik, N. (2026). Risiko Pengelolaan Dana Desa dan SILPA dalam Perspektif Akuntabilitas Publik Kecamatan Tugumulyo Musi Rawas. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 16(1), 64–72. <https://doi.org/10.37859/jae.v16i1.11408>.
- Oktavia, Y., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Desentralisasi dan Otonomi Pemerintahan Daerah: Studi Literatur Tentang Dinamika Kebijakan Pemerintahan Daerah Pasca-Reformasi. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 4(2), 157–165. <https://doi.org/10.24036/publicness.v4i2.260>.
- Pehi, Z., & Rompas, P. T. D. (2023). Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Dana Santunan Duka Berbasis Web Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon. *EduTIK: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 3(5), 298. <https://calamus.id/index.php/edutik/article/view/37/36>.
- Pramiyati, T., Jayanta, J., & Yulnelly, Y. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil). *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8(2), 679. <https://doi.org/10.24176/simet.v8i2.1574>.
- Pratama, A. T., Putri, D. G., Mayasari, M., & Sy, A. M. M. E. (2025). Tantangan dan peluang otonomi daerah dalam mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi lokal. *Kalianda Halok Gagas*, 8(1), 1–16. <https://ojs.umkal.ac.id/index.php/halokgagas/article/view/103/88>.
- Priono, U., Putri, D. A., & Mappadang, A. (2025). Peran Pengawasan dan Program Efisiensi dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintah: Perspektif Good Governance. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 3(2), 2134–2149. <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i2.1337>.
- R, D. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–21. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/1409/1156>.
- Rahman, A. R. (2023). Peranan Pemerintah Desa Bulutellue dalam Memberdayakan Masyarakat di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 4(3), 77–89. <https://doi.org/10.47747/jismab.v4i3.1313>.
- Rohmah, R. R., Asror, Z., Purwanto, & Wafiroh, L. N. (2025). Pendampingan Penguatan Tata Kelola dan Administrasi Keuangan pada BUMDes Raharja Desa Punjul,

- Kecamatan Karangrejo, Tulungagung. *Jurnal Kemitraan Masyarakat*, (3). <https://pkm.lpkd.or.id/index.php/JKM/article/view/2582/2466>.
- Sari, F. K., Salahudin, & Sulaiman, E. (2024). Analisis Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi pada Kantor Desa Sumberejo Kota Batu). *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(2), 186–194. <http://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/633/355>.
- Suharmanto, S., & Supardal, S. (2025). Implementasi Kebijakan Dana Desa Non-Tunai Berbasis CMS Studi di Desa Dlisenkulon Kabupaten Purworejo. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 9(1), 75–84. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.621>.
- Syaban, A., & Mokodompit, E. A. (2024). Strategi Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Sektor Maritim: Studi Kasus Di Pelabuhan Nusantara Kendari. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 5(2), 294–302. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJMA/index>.
- Wulandari, E., Arivia, A. F., & Saragih, A. (2025). Desain Penelitian Studi Kasus Dalam Metodologi Kualitatif. *Qalam Lil Muftadiin*, 3(2). <https://doi.org/10.58822/qlm.v3i2.485>.
- Zai, K. B. J., Degodona, L. P., & Tobing, A. L. (2025). Analisis Standar dan Mekanisme Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik Kota Medan Berdasarkan PERMEN PANRB No. 92 Tahun 2021. *Journal of Laguna Geography*, 4(1), 31–35. <https://doi.org/10.52562/joulage.v4i1.1543>.

